



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

RENJA

(RENCANA KERJA)

TAHUN **2023**

Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang

TAHUN **2022**

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
Jl. Muso Bin Salim No.6, Tenggarong.75512
e-mail : dinaspertaru@gmail.com

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang kabupaten Kutai kartanegara menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja ini memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta yang terpenting adalah memuat mengenai evaluasi, analisis kinerja, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2023, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Tenggarong, Juli 2022

Kepala Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang



SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008

Rencana Kerja

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan OPD	42
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	54
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	90
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	93
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	93
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	96
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	97
4.1 Program dan Kegiatan	97
BAB V PENUTUP	121

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis Lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah tersebut disusun dalam dokumen Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah.

Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
 - o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
 - p. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- q. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
- r. Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
- s. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B – 370/BAPP/V.1/065.II/02/2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara mengaju kepada Permendagri 86 Tahun 2017, dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program Dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian Renstra. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) urusan Pertanahan dan urusan penataan ruang tahun 2021 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, melaksanakan 6 (Enam) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra urusan Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini

Berikut ini adalah realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2021 :

Tabel III.21 Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,804,811,200	1,785,722,827.00	63.67	1,019,088,373.00
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,500,000,000	964,637,187.00	64.31	535,362,813.00
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	900,000,000	667,927,687.00	74.21
		Pelaksanaan Persetujuan	600,000,	296,709,	49.45	303,290,

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	000	500.00		500.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	650,000,000	225,922,240.00	34.76	424,077,760.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk	650,000,000	225,922,240.00	34.76	424,077,760.00
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Investasi dan Pembangunan Daerah				

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	654,811,200	595,163,400.00	90.89	59,647,800.00
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	654,811,200	595,163,400.00	90.89	59,647,800.00
Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,612,218,056	11,563,070,531.00	91.68	1,049,147,525.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113,205,200	70,750,600.00	62.50	42,454,600.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,253,200	38,528,100.00	54.84	31,725,100.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,952,000	32,222,500.00	75.02	10,729,500.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,253,432,145	7,769,781,179.00	94.14	483,650,966.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,885,052,145	7,452,571,179.00	94.52	432,480,966.00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	166,090,000	166,090,000.00	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	202,290,000	151,120,000.00	74.70	51,170,000.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55,220,000	54,756,000.00	99.16	464,000.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55,220,000	54,756,000.00	99.16	464,000.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	696,365,400.00	482,114,820.00	69.23	214,250,580.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	0.00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,159,500.00	99,145,140.00	98.99	1,014,360.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132,220,000.00	128,552,200.00	97.23	3,667,800.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52,852,900.00	52,687,300.00	99.69	165,600.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,610,000.00	13,380,000.00	91.58	1,230,000.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298,079,000.00	92,929,180.00	31.18	205,149,820.00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	98,444,000.00	95,421,000.00	96.93	3,023,000.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	592,657,820.00	591,087,800.00	99.74	1,570,020.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	592,657,820.00	591,087,800.00	99.74	1,570,020.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,416,648,864.00	1,284,040,680.00	90.64	132,608,184.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	213,343,380.00	170,790,073.00	80.05	42,553,307.00
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Sumber Daya Air dan Listrik				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,203,305,484.00	1,113,250,607.00	92.52	90,054,877.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,484,688,627.00	1,310,539,452.00	88.27	174,149,175.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,500,000.00	18,610,276.00	27.57	48,889,724.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240,832,000.00	120,322,025.00	49.96	120,509,975.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,176,356,627.00	1,171,607,151.00	99.60	4,749,476.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	- Meningkatkan kepemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat. - Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa Tanah Negara.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	149,999,800.00	126,977,000.00	84.65	23,022,800.00
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	149,999,800.00	126,977,000.00	84.65	23,022,800.00
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149,999,800.00	126,977,000.00	84.65	23,022,800.00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI	349,999,900.00	244,738,900.00	69.93	105,261,000.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349,999,900.00	244,738,900.00	69.93	105,261,000.00
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	150,000,000.00	96,795,000.00	64.53	53,205,000.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	199,999,900.00	147,943,900.00	73.97	52,056,000.00
		PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	377,274,600.00	271,478,320.00	71.96	105,796,280.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	377,274,600.00	271,478,320.00	71.96	105,796,280.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	377,274,600.00	271,478,320.00	71.96	105,796,280.00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	150,390,258.00	146,550,319.00	97.45	3,839,939.00
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	150,390,258.00	146,550,319.00	97.45	3,839,939.00
		Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150,390,258.00	146,550,319.00	97.45	3,839,939.00
Total			16,444,693,814.00	14,138,537,897.00	85.98	2,306,155,917.00

Dari tabel di atas disampaikan realisasi capaian kinerja dari lima (5) program yang dilaksanakan pada tahun 2021, hasil capaian terendah yaitu dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk capaian yang tinggi tersebar di beberapa program dan kegiatan. Adapun penjelasan program kegiatan berdasarkan memenuhi target atau tidaknya, dijelaskan pada uraian di bawah ini :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikelompokkan beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Tujuh (7) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan, 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan tersebut satu kegiatan tidak memenuhi target yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan kode rekening pada aplikasi SIPD.

2.1.2 Realisasi Program yang Memenuhi Target

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Tujuh (7) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan, 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan ada satu kegiatan tidak memenuhi target yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor namun 18 (Delapan Belas) Sub kegiatan dapat memenuhi target capaian dengan anggaran Rp. 12.612.218.056,00 terserap 91,68% yaitu Rp. 11.563.070.531,00
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ini dijalankan dengan tiga (3) kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan, walaupun kegiatan ini terdapat kesalahan dalam penganggaran RKA/DPA dan dimana belanja modal tidak sesuai dengan tujuan kegiatan yang dimaksud sehingga kegiatan dilaksanakan pada saat APBD-P ,kemudian terdapat perubahan pedoman RDTR sehingga harus melakukan pembaharuan pedoman RDTR dari sebelumnya namun semua kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100%, dengan anggaran Rp 2.804.811.200,00 terserap 63.67% yaitu Rp 1.785.722.827,00
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Pada program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ini dijalankan dengan satu (1) sub kegiatan kegiatan. kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100%, karena dari sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat difasilitasi dan diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan

baik. dengan anggaran terealisasi 84.65 % yaitu sebesar Rp126.977.000,00 dari total pagu Rp. 149.999.800,00

4. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
Pada program ini dijalankan dengan satu (1) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100%, dengan anggaran terealisasi 69.93 % yaitu sebesar Rp 244.738.900,00 dari total pagu Rp 349.999.900,00
5. Program Penatagunaan Tanah
Pada program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini dijalankan dengan Empat (4) kegiatan. Dari Empat (4) kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100%, terealisasi 271.478.320,00 Rp. 71.96 % yaitu sebesar Rp 377.274.600,00

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapaiannya, Terpenuhinya, Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam Penganggaran RKA/DPA dan kode rekening pada system SIPD
2. Kurangnya koordinasi untuk beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target.
3. Efisiensi anggaran
4. Pelaksanaan program/kegiatan Tidak maksimalnya akibat pandemi covid- 19

Adapun tercapainya target kinerja ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Penyusunan target Rencana kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas;
2. Ketersediaan dana yang sesuai dengan anggaran kas
3. Waktu dan pelaksanaan kegiatan yang mencukupi sesuai dengan *time schedule*;
4. Kualitas dan komitmen sumber daya manusia untuk pencapaian target Program/kegiatan;
5. Motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan serta pengambilan keputusan yang dilakukan Pimpinan sehingga membantu optimalisasi kinerja;
6. Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan

2.1.4 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra maka peningkatan sertifikasi aset Pemerintah Daerah telah ditarget setiap tahunnya untuk mengalami peningkatan;
2. Kegiatan pembinaan administrasi pertanahan di desa/kabupaten dapat dilaksanakan sesuai dengan target, harapannya dengan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan Perbub No 36 Tahun 2013
3. Penyelesaian Sengketa pertanahan memperkecil rasio sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Tersusunnya dokumen RDTR Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagaimana terlampir :

TabelT-C.29
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD TAHUN 2021
 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
01 .	03 .	12								
	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase	65				65		

01	03	12	2.0		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	Persentase	10					10		
01	03	12	2.0	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	Perda/ Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
01	03	12	2.0	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	Perbup/ Pendampingan	4	4 Pendampingan	4 Pendampingan	4 Pendampingan	100%	2 Dokumen	-	-
01	03	12	2.0		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	Persentase	16.77%					16.77%		
01	03	12	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	Dokumen	1	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-

01 .	03 .	12	2.0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase	4.89%					4.89%		
01 .	03 .	12	2.0 3	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1) Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan, 2) Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang , 3) Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
01 .	03 .	12	2.0 3	0 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini	Persen	20	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
01 .	03 .	12	2.0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	Persentase	6.87%					6.87%		

01	03	12	2.0 4	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah Materi Teknis 2) Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif	1) Dokumen, 2) Perbup	1) 1 2) 0	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
01	03	12	2.0 4	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1) Berkas, 2) Aplikasi,	1) 50 2) 1	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
01	03	12	2.0 4	0 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	Berkas	20	-	-	-	-	20 Kasus	-	-
01	03	12	2.0 4	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi	Dokumen	1	1 Dokum en	1 Dokume n	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-

X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74					74		
X	X	01	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen	15					15		
X	X	01	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen	10	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	-	-
X	X	01	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen	5	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	-	-
X	X	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan	15					15		

X	X	01	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Laporan	76	76	76	76	100%	76 Orang/Bulan	-	-
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	-	-
X	X	01	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	umlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1					1		
X	X	01	2.0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
X	X	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	1					1		

X	X	01	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	Dokumen	1	-	-	-	-	5 Dokumen	-	-
X	X	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan	7					7		
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen insatalasi listrik	Jumlah Komponen/ Paket	1	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	45	45	45	45	100%	1 Paket	-	-
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). Jenis 2). Kotak, 3). Porsi	1). 7 2). 1200 3). 1000	1) 18 2) 200 3) 200	1) 18 2) 200 3) 200	1) 18 2) 200 3) 200	100%	1 Paket	-	-

X	X	01	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) jenis 2) Lembar	1) 4 2) 36000	1) 53 2) 35000	1) 53 2) 35000	1) 53 2) 35000	100%	1 Paket	-	-
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	2790	3000	3000	3000	100%	1 Paket	-	-
X	X	01	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	15	30	30	30	100%	78 Laporan	-	-
X	X	01	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	1	1	100%	1 Dokumen	-	-

X	X	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12					12			
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	5	5	5	5	100%	5	-	-	
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) Orang, 2) Orang	1) 51 2) 8	1) 51 2) 8	1) 51 2) 8	1) 51 2) 8	100%	1) 51 8	2)	-	-

X	X	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	13						13		
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaran dinas	Unit	6	6	6	6	100%	6 Unit	-	-	
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	Unit	6	1) 8 2) 6	1) 8 2) 6	1) 8 2) 6	100%	6 Unit	-	-	
X	X	01	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	Gedung	1	1	1	1	100%	1 Unit	-	-	

X	X X	2	10	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	Persentase	15					15		
2	10	02	2.0 1		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal)	Dokumen	1					1		

2	10	02	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Dokumen	1	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
X	X X	2	10	0 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persentase	80					80		
2	10	04	2.0 1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	22					22		

2	10	04	2.0 1	0 1	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Tersedianya informasi rencana lahan pembangunan yg tdk bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Dokumen	2	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-
2	10	04	2.0 1	0 2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	20	125 Kasus	125 Kasus	125 Kasus	100%	20	-	-
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase	70					70		

2	10	05	2.0 1		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1						1		
2	10	05	2.0 1	0 1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dokumen	1	1 Dokum en	1 Dokume n	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	
X	X X	2	10	0 6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	Persentase	83						83		

2	10	06	2.0 1		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	Dokumen	2						2		
2	10	06	2	0 1	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	1	1 Dokum en	1 Dokume n	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	
2	10	06	2	0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota	Dokumen	1	1 Dokum en	1 Dokume n	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	

2	10	06	2.0 2		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1							1		
2	10	06	2.0 2	0 1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-		

2	10	07	2.0 1		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	Persentase	15						15		
2	10	07	2.0 1		Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota	Dokumen	1						1		
2	10	07	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	Dokumen	1	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tersedianya pengelolaan tanah kosong	Persentase	55						55		

2	10	08	2.0 1		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	Dokumen	1						1				
2	10	08	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	Dokumen	1	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-		
2	10	08	2.0 2		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kegiatan	1						1				

2	10	08	2.0 2	0 1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventarisasi tanah kosong	Dokumen	0	-	-	-	-	1 laporan	-	-
2	10	08	2.0 2	0 2	Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen, 2) Jumlah Tanah Aset Pemda yang difasilitasi untuk di Sertifikat (Peruntukan Penggunaan)	1) Dokumen 2) Lokasi	1) 1 Dokumen 2) 100 Lokasi	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
X	X X	2	10	0 9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persentase	82					82		
2	10	09	2.0 1		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	1					1		

2	10	09	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	1	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
X	X X	2	10	1 0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	Persentase	76					76		
2	10	10	2.0 1		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	1					1		

2	10	10	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	1	1 Dokum en	1 Dokume n	1 Dokumen	100%	1 laporan	-	-
---	----	----	----------	--------	--	--	---------	---	------------------	------------------	-----------	------	-----------	---	---

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT OPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Beberapa Indikator yang ditetapkan dalam mengukur kinerja, antara lain ditetapkan berdasarkan indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga dijadikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

TABEL TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	-	-	45	70	75	80	85	-	-	-	
2	Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara	-	-	64.29	95,83	96	100	100	-	-	-	
3	Terlaksananya penyuluhan Sengketa	-	-	0	0	0	9	9	-	-	-	
4	Meningkatnya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat	-	-	8.7	54,65	65	75	100	-	-	-	
5	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	-	-	0	1	30	6	1	-	-	-	

Tabel Sasaran : Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)	85%	73,29%	86,22%	Tinggi

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan tujuan pemerintah salah satunya melalui transparansi dan akuntabilitas. Transparansi meningkatkan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat daerah secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. pengukuran kinerja, penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja.

Penilaian hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai dari 0 sd 100 yang terbagi ke dalam beberapa predikat, sebagai berikut :

- a. Nilai 0 sd 30, predikat penilaian D (sangat kurang)
- b. Nilai > 30 sd 50, predikat penilaian C (kurang)
- c. Nilai > 50 sd 60, Penilaian predikat CC (cukup/memadai)
- d. Nilai > 60 sd 70, Penilaian Predikat B (Baik)
- e. Nilai > 70 sd 80, Penilaian Predikat BB (Sangat baik)
- f. Nilai >80 sd 90, Predikat Penilaian A (Memuaskan)
- g. Nilai > 90 sd 100, Predikat Penilaian AA (Sangat Memuaskan)

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,98	26,83	Meningkat
2.	Pengukuran Kinerja	25%	15,94	13,75	-
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,42	12,85	Meningkat
4.	Evaluasi Kinerja	10%	6,85	5,50	-
5.	Capaian Kinerja	20%	14,38	14,38	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	72,56	73,29	Meningkat
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	Meningkat

Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian sasaran/kinerja operasional. Selain itu dilakukan pula terhadap perencanaan strategis termasuk perjanjian kinerja dan system Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dengan target sebesar 85 atau Predikat “A” berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2021 yang merupakan penilaian pencapaian akuntabilitas tahun 2020 . Capaian akuntabilitas Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang mendapatkan nilai 73,29 atau dengan Predikat “BB” atau capaian kinerja sebesar 86,22 % sedangkan pemeriksaan untuk Akuntabilitas Tahun 2021 belum dilakukan sampai dengan laporan ini dibuat. Jika dilihat dari realisasi, maka dapat dikatakan bahwa Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target akan tetapi indikator Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang meliputi Meningkatnya Pelayanan Dasar Operasional Kantor yang berkualitas dan Melayani, Persentase Kendaraan Dalam Kondisi Baik , Persentase Peralatan/perlengkapan kantor dalam kondisi baik , Persentase Gedung kantor dalam kondisi baik realisasi mencapai 100% terhadap target. Tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan karena kegiatan yang sifatnya dan pelaksanaannya rutin dapat terlaksana dengan baik serta pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang disajikan selalu tepat waktu dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan ,namun dalam pelaksanaannya ada 2 indikator yang tidak bisa dilaksanakan yaitu Meningkatnya Disiplin Aparatur dan indikator Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur karena tidak tersedianya anggaran pada kegiatan tahun 2021. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Beberapa rekomendasi terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu proses pengukuran kinerja dan rencana aksi yang belum optimal

dilakukan seperti pengukuran dan pelaporan secara berkala yang harus dilakukan oleh perangkat daerah ini menjadi bahan masukan terhadap perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan, sehingga target yang ditetapkan atas nilai SAKIP pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun mendatang tercapai. Solusi/rekomendasi untuk permasalahan tersebut di atas antara lain

Melakukan pengendalian dan evaluasi melalui pengukuran kinerja bulanan dan triwulanan berbasis teknologi dan informasi (Aplikasi), Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan tugas dan Fungsi serta mengusulkan tambahan anggaran kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel Sasaran : Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyuluhan sengketa pertanahan	9	0	0%
		Meningkatnya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat	75%	100%	100%

- Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2021 sebesar 75% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi namun banyak faktor kendala dari

indikator pada tahun 2021 yaitu masalah berbagai hal termasuk Masih tidak tertib administrasi pertanahan ditingkat Desa/kelurahan dan kecamatan serta Tidak sinkronnya data yang disajikan mengenai inventarisasi asset lahan Pemda yang diberikan BPKAD dengan kondisi lapangan sehingga mempersulit identifikasi lokasi masalah lain yaitu Dokumen tanah tidak lengkap, ukuran tanah berubah, dokumen tanah tidak ada, aset tanah Pemda digunakan pihak lain, tercatat di KIB tapi lokasi tidak diketahui, tanda patok batas tidak diketahui dan banyaknya data data penguasaan tanah yang tumpang tindih solusi / rekomendasinya adalah Melakukan koordinasi dengan BPKAD dan seluruh pihak yang terkait

- Target kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 yaitu Terlaksananya penyuluhan Sengketa Pertanahan di Kecamatan dengan target 9 kecamatan tidak dapat tercapai .Target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak adanya Penyediaan anggaran pada kegiatan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Tidak Konsistennya Proses Anggaran dalam hal Kegiatan penyuluhan Sengketa Pertanahan di Kecamatan solusi / rekomendasinya adalah Melakukan koordinasi dengan pihak Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara terkait masalah Penyuluhan sengketa pertanahan.
- Target kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % . Target kinerja tercapai karena dari sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat difasilitasi dan diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu SDM kurang, sehingga pelayanan kurang maksimal dan belum tersedianya regulasi urusan sengketa tanah garapan solusi / rekomendasinya adalah Melakukan koordinasi dengan pihak terkait perihal penyusunan regulasi urusan sengketa tanah garapan.

Tabel Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Kepala	1	1	100%

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-3” tahun 2021 sebesar 1 Dokumen dan terrealisasi 1 dokumen atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kriteria Tinggi, Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu ada kesalahan dalam penganggaran RKA/DPA , dimana belanja modal tidak sesuai dengan tujuan kegiatan yang dimaksud sehingga kegiatan dilaksanakan pada saat APBD-P ,kemudian terdapat perubahan pedoman RDTR sehingga harus melakukan pembaharuan pedoman RDTR dari sebelumnya solusi/rekomendasinya adalah mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal kekuatan hukum atas pengendalian dan pemanfaatan ruang.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Pengertian isu strategis menurut Permendagri 54 Tahun 2010 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Masih rendahnya sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah;
2. Belum dimilikinya dokumen perencanaan Tata Ruang yang baik;
3. Belum terintegrasi data pengaduan dan Penanganan sengketa
4. Belum tertibnya administrasi pertanahan di masing-masing Desa/Kecamatan seperti penertiban SKPT yang menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah;
5. Banyaknya persoalan-persolan sengketa pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terselesaikan baik yang dikuasai oleh masyarakat, Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga.
6. Pemetaan Program dan Kegiatan baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Adaptasi perubahan kebiasaan baru dengan adanya Pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia.

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas embantuan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

b. Fungsi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - Seksi Pemetaan Tata Ruang
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
 - Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - Seksi Data dan Informasi Pertanahan
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
 - Seksi Penatagunaan Tanah
 - Seksi Data dan Pemetaan Tematik
 - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :

- Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
- Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
- Seksi Penyuluhan Pertanahan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis.
2. Belum dimilikinya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per wilayah;
3. Adanya perbedaan kondisi antara data tata ruang dan kondisi lapangan.
4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
5. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah;
6. Perlunya penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penerbitan SKPT dan PBB;
7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan di beberapa kecamatan/desa dan ex HGU di beberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut;
8. Belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang dengan baik dan tersistem;

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berpegang pada Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibuat dan disepakati, yaitu sebagai berikut :

Menurut Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 , Sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

❖ **Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.

❖ **Masyarakat yang berbahagia**, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2024 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi,

sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pertanahan
5. dan Penataan Ruang; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian beberapa misi pembangunan, di antaranya :

1. *Pencapaian Misi I : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani*

Dalam pelaksanaan misi ini, Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

2. *Pencapaian Misi IV : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah*

Dalam pencapaian misi ini Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan

Sasaran : Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahana Pola Ruang

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

2. Misi

- Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
- Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah

Dala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan Misi Ke Lima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah” , yang tujuannya untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1. Penyelesaian Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Meyelesaikan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah di beberapa Wilayah Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mengatasi ketidakperpaduan rencana tata ruang dengan kondisi lapangan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Pertanahan dan penataan ruang.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. pemanfaatan lahan tidak optimal
2. Belum terpenuhinya kebutuhan data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
3. Belum terwujudnya arah pembangunan sesuai dengan tata ruang;
4. Permasalahan dalam hal Pembebasan Lahan;
5. Data-data dan informasi pertanahan yang belum terakomodir dengan baik;
6. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah;
7. Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
4. Pelaksanaan program/kegiatan Tidak maksimal akibat pandemi covid-19

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Mengotimalkan pelaksanaan tertib administrasi pertanahan
- b. Meningkatkan koordinasi dan dokumen perencanaan tata ruang skala rinci
- c. Melakukan inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Pemkab.
- d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG Tata Ruang dan pertanahan
- e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan ruang dan pertanahan

- f. Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pertanahan dan Penataan Ruang

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan , tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Pada tahun 2021, Program dan kegiatan Dinas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada rancangan rencana kerja tahun 2023 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2024.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel terlampir.

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	PROGRAM PENYELENGGAR AN PENATAAN RUANG	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	70	Persentase	2,300,000,000	PROGRAM PENYELENGGARA N PENATAAN RUANG		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	70	Persentase	2,300,000,000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Perencanaan Tata Ruang	9	Persentase	500,000,000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Indeks Perencanaan Tata Ruang	9	Persentase	500,000,000	

1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300,000,000	
2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4	Dokumen	200,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Muara Badak, Sanga Sanga, Marang Kayu	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4	Dokumen	200,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	21.81	Persentase	600,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	21.81	Perse	600,000,000	

3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	400,000,000	
4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	Dokumen	200,000,000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	Dokumen	200,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	5.03	Persentase	450,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	5.03	Persentase	450,000,000	

5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20	Dokumen	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Sanga Sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20	Dokumen	300,000,000	
6	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	Dokumen	150,000,000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Loa Janan, Kota Bangun, Marang Kayu	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dokumen	150,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pengendalian Tata Ruang	6.87	Persentase	750,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pengendalian Tata Ruang	6.87	Persentase	750,000,000	

7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Kota Bangun, Muara Badak, Muara Muntai, Muara Kaman, Muara Jawa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	200,000,000	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggarong Seberang, Muara Wis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	200,000,000	

9	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20	Kasus	150,000,000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak,	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20	Kasus	150,000,000	
10	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Dokumen	200,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Dokumen	200,000,000	
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	10,894,855,936	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	11,138,685,122	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang)	Jumlah dokumen Evaluasi	15	Dokumen	125,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi	15	Dokumen	125,000,000	
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	75,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	75,000,000	

12	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	50,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	50,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2	Laporan	8,229,050,452	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	8,472,879,638.00	

13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	Orang /bulan	7,979,050,452.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	Orang /bulan	8,222,879,638.00	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Laporan	250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Laporan	250,000,000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	1	Laporan	50,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	2	Dokumen	50,000,000	
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	50,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	755,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	755,000,000	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	35,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	35,000,000	

17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	Paket	105,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	105,000,000	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	210,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	210,000,000	

19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	60,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	60,000,000	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2790	Dokumen	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	15,000,000	

21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	230,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	230,000,000	
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	100,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	100,000,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1,418,305,484	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1,418,305,484	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	215,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	215,000,000	

24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	59	Laporan	1,203,305,484	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	1,203,305,484	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Barang Milik Daerah	16	Unit	317,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12	Unit	317,500,000	

25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	67,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	67,500,000	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	250,000,000	

III	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	30	Persentase	100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	30	Perse n	100,000,000	
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal)	1	Doku men	100,000,000	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		JumlahLaporan HasilKegiatanPe mberianIzin LokasiDalam 1(Satu)DaerahKa bupaten/Kota	1	Doku men	100,000,000	

27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Muara Badak, Sebulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	1	Dokumen	100,000,000	
IV	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	85	Persentase	300,000,000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	85	Persentase	300,000,000	

	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23	Dokumen	300,000,000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23	Dokumen	300,000,000	
28	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	200,000,000	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	200,000,000	
29	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21	Berita Acara	100,000,000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Anggana, Muara Badak, Sebulu, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Marang Kayu	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21	Berita Acara	100,000,000	

V	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	75	Persentase	350,000,000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	75	Perse n	350,000,000	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Doku men	350,000,000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Doku men	350,000,000	

30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Muara Badak, Tenggarong, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	350,000,000	
VI	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	86	Persentase	600,000,000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	86	Perse n	600,000,000	

	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	4	Dokumen	400,000,000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum	4	Dokumen	400,000,000	
31	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Muara Badak, Sebulu (Giri Agung), Kota Bangun, Muara Kaman (Bunga Jadi), Muara Jawa, Marang Kayu	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	

32	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kembang Janggut (Long Beleh Haloq), Tabang (Gunung Sari, Long Lalang), Marang Kayu	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	
33	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Anggana, Muara Badak, Sebulu, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Marang Kayu	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	100,000,000	

34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kecamatan Kembang Janggut (Desa Long Beleh Haloq) (Desa Long Beleh Modang), Tabang (Desa Long Lalang), Marang Kayu (Desa Santan Tengah) (Desa Semangkok) (Desa Santan Ulu)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	
----	---	------------------------	--	---	---------	-------------	---	--	--	---	---------	-------------	--

	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	200,000,000	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	200,000,000	
35	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bangun , Kenohan , Muara Kaman	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	

36	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kembang Janggut (Desa Long Beleh Haloq) (Desa Long Beleh Modang), Muara Muntai (Desa Perian) (Desa Muara Leka), Muara Wis (Desa Lebak Mantan), Tabang (Desa Long Lalang) (Desa Gung Sari).	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	
----	--	------------------------	--	---	---------	-------------	--	--	--	---	---------	-------------	--

VI	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	30	Persentase	200,000,000	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	30	Perse	200,000,000	
	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota	2	Doku	200,000,000	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota		Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota	2	Doku	200,000,000	
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Lapora n	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamata n Anggana , Sebulu , Muara Kaman , Sanga Sanga	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Lapora n	100,000,000	

38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Sangasanga, Anggana	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	
VI II	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersedianya pengelolaan tanah kosong	60	Persentase	934,799,664	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	60	Perse n	934,799,664	
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	1	Laporan	100,000,000	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	1	Dokumen	100,000,000	

39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Anggana dan Muara Badak	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	100,000,000	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2	Dokumen	834,799,664	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2	Dokumen	834,799,664	
40	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	100,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kecamatan Kota Bangun, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang, Loajan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	100,000,000	

41	Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	734,799,664	Pemanfaatan Tanah Kosong	Kecamatan Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Loa Janan, Tabang, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	734,799,664	
IX	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	83	Persentase	200,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	83	Persentase	200,000,000	
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	2	Dokumen	200,000,000	Penerbitan Izin Membuka Tanah		Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	2	Dokumen	200,000,000	
42	Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi	Muara Muntai,	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	100,000,000	

Pemberian Izin Membuka Tanah	Kartanegara (18 Kecamatan)	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah					Pemberian Izin Membuka Tanah	Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggarong, Seberang, Marang Kayu, Muara Wis	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------	---	--	--	--	--	--

43	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1	Dokumen	100,000,000	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Kembang Janggut, Samboja	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1	Dokumen	100,000,000	
X	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersedianya Penataangunaan Tanah	77	Persentase	300,000,000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase tersedianya Penatagunaan Tanah	77	Perse n	300,000,000	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3	Dokumen	300,000,000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1	Dokumen	300,000,000	

44	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	100,000,000	
45	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Kecamatan Kota Bangun, Loa Kulu, Tenggaron g Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1	Dokumen	100,000,000	

46	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Kecamatan Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	
JUMLAH						16,179,655,600						16,423,484,786	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun 2023 berasal dari usulan Kecamatan dan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan. Usulan program dan kegiatan selanjutnya akan dilakukan verifikasi ulang menyesuaikan dengan tujuan, indikator, dan lokasi Prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan juga memperhatikan dukungan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara. Adapun Kegiatan yang merupakan usulan dari Kecamatan sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yaitu sebagaimana berikut :

TABEL T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kembang janggut	Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Pembebasan lahan Pasar Kecamatan (± 2 ha)
		Kecamatan Muara Badak		1 Dokumen	Pembebasan lahan untuk tempat pemakaman umum muslimin (± 13.969 M ²)
		Desa Tanjung Limau Kec.Muara Badak		1 Dokumen	Pembebasan lahan untuk SD 020 (1 Ha)
		Desa Salo Cella Kec.Muara Badak		1 Dokumen	Pembebasan lahan untuk SD 011 (1 Ha)
2	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	Sertifikasi Lahan Sawah Basah (45 Persil)

Dari usulan-usulan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diserap kedalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, sehingga pengusulan program dan kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran dan usulan serta kebutuhan program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telahaan terhadap kebijakan nasional merupakan penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, ketahanan pangan, iklim usaha dan investasi. Lingkungan hiduo, hukum dan keamanan Provinsi yang terkait dengan pembangunan Kabupaten.

Kebijakan yang dibuat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan tindak lanjut kebijakan Kabupaten Kutai kartanegara dalam pengaturan dan pengelolaan bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Arah Kebijakan	Strategi Kementrian
1.	Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang - Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder - Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat eselon III) - Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan pemilikan bidang tanah (3R - <i>Rights Restrictions</i> dan <i>Responsibilities</i> atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T), - Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.
2.	PenyediaanInfrast ruktur Informasi Kadastral	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Fit For Purpose Kadaster - Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, crowd funding maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun

No	Arah Kebijakan	Strategi Kementrian
		<p>sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap - Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi
3.	Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Tenureship)	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah - Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak - Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap
4.	Aspek Nilai Tanah (Land Value)	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyajian informasi nilai tanah berbasis bidang yang diintegrasikan kedalam peta bidang tanah (kadaster)
5.	Aspek Penggunaan Tanah (Land Use)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang; - Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).
6.	Aspek Pengembangan Pertanahan (Land Development)	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah; - Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD.

No	Arah Kebijakan	Strategi Kementrian
7.	Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak; - Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Penerapan prinsip Talent Pool Management ; - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital; - Peningkatan kualitas proses dan output / keluaran administrasi pertanahan; - Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); - Optimalisasi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan; - Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi).
No	Arah Kebijakan	Strategi PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batu bara yang bernilai tambah tinggi dan brwawasan lingkungan menjadi sektir unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat 2 Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi yang wilayah dan nasional 3 Perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau 4 Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi

		<p>seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi</p> <p>5 Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelstarian lingkungan serta menunggang aspek politik, Pertahanan dan keamanan</p>
--	--	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan, perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang handal di bidang pertanahan dan penataan ruang. Untuk itu disusun Visi dan Misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang akan dicapai melalui tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan pendukung. Dalam hal ini Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pernyataan untuk mendukung visi dan misi Bupati, yaitu “ Terwujudnya Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Selanjutnya dalam keterkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, beberapa program, kegiatan/sub kegiatan di rencanakan pada tahun 2023 dan secara berkesinambungan akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan periode RPJMD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan PD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Visi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebagaimana yang pada tabel di bawah ini berikut dengan perkiraan maju tahun 2024 sebagai berikut :

5. Tabel C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5		6	7	8	8	10
01.03.1					PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW		70	Persen	2,300,000,000	APBD		75	2,300,000,000
01.03.2	01				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang		9	Persen	500,000,000			11	1,050,000,000
01.03.2	01	02			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Dokumen	300,000,000	APBD		1	400,000,000

0 1.	0 3.	1 2	2. 01	0 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	1)Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2) Jumlah Penetapan Kebijakan terkait bangunan berijin dan tidak berijin		0	Dokumen	-	APBD		1	400,000,000
0 1.	0 3.	1 2	2. 01	0 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Loa Janan, Muara Badak, Sanga Sanga, Marang Kayu	4	Dokumen	200,000,000	APBD		4	250,000,000
0 1.	0 3.	1 2	2. 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang		21.81	Persen	600,000,000			15.04	-
0 1.	0 3.	1 2	2. 02	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bangun	1	Dokumen	400,000,000	APBD			-

0 1.	0 3.	1 2	2. 02	0 3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	200,000,000	APBD			-
0 1.	0 3.	1 2	2. 03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang		5.03	Persen	450,000,000			5.03	550,000,000
0 1.	0 3.	1 2	2. 03	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Sanga Sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu	20	Dokumen	300,000,000	APBD		20	400,000,000
0 1.	0 3.	1 2	2. 03	0 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Loa Janan, Kota Bangun, Marang Kayu	1 Dokumen	Dokumen	150,000,000	APBD		1	150,000,000

0 1.	0 3.	1 2	2. 04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang		6.87	Persen	750,000,000			3.75	700,000,000
0 1.	0 3.	1 2	2. 04	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Kota Bangun, Muara Badak, Muara Muntai, Muara Kaman, Muara Jawa	1 Dokumen	Dokumen	200,000,000	APBD			-
0 1.	0 3.	1 2	2. 04	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggara Seberang, Muara Wis	1 Dokumen	Dokumen	200,000,000	APBD		1	250,000,000
0 1.	0 3.	1 2	2. 04	0 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak,	20	Kasus	150,000,000	APBD		20	150,000,000

0 1.	0 3.	1 2.	2. 04	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga	1 Doku men	Dokume n	200,000,000	APBD		1	300,000,000
2	1 0	0 1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75	Nilai	10,894,855,936	APB D		76	11,054,855,936
2	1 0	0 1.	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi		15	Dokume n	125,000,000			15	125,000,000
2	1 0	0 1.	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	10	Dokume n	75,000,000	APBD		10	75,000,000
2	1 0	0 1.	2. 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	5	Laporan	50,000,000	APBD		5	50,000,000

2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		12	Laporan	8,229,050,452			2	8,229,050,452
2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	74	Orang/bulan	7,979,050,452.00	APBD		74	7,979,050,452.00
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	2	Laporan	250,000,000	APBD		2	250,000,000
2	1	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah		2	Dokumen	50,000,000			1	50,000,000

2	1	0	2.	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	2	Laporan	50,000,000	APBD		1	50,000,000
2	1	0	2.	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		0	Dokumen				1	160,000,000
2	1	1	2.	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	0	Stel				156	160,000,000
2	1	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	Layanan	755,000,000			7	755,000,000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Paket	35,000,000	APBD		1	35,000,000

2	1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Paket	105,000,000	APBD		45	105,000,000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Paket	210,000,000	APBD		3	210,000,000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Paket	60,000,000	APBD		4	60,000,000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Dokumen	15,000,000	APBD		2,790	15,000,000
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	15	Laporan	230,000,000	APBD		15	230,000,000

2	1	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	1,418,305,484			12	1,418,305,484
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	5	Laporan	215,000,000	APBD		5	215,000,000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	2	Laporan	1,203,305,484	APBD		59	1,203,305,484
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		12	Unit	317,500,000			16	317,500,000

2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	11	Unit	67,500,000	APBD		11	67,500,000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	3	Unit	250,000,000	APBD		5	250,000,000
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi		30	Persen	100,000,000	APB D		45	100,000,000
2	1	0	2.		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	JumlahLaporan HasilKegiatanPemberianIzin LokasiDalam 1(Satu)DaerahKabupaten/Kota		1	Dokumen	100,000,000			1	100,000,000

2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	Muara Badak, Sebulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	0	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		85	Persen	300,000,000	APBD		90	300,000,000
2	1	0	4	2	01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23	Dokumen	300,000,000			23	300,000,000

2	1	0	2	0	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	2	Dokumen	200,000,000	APBD		2	200,000,000
2	1	0	2	0	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Anggana, Muara Badak, Sebulu, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Marang Kayu	21	Berita Acara	100,000,000	APBD		21	100,000,000
2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		75	Persen	350,000,000	APBD		80	350,000,000

2	1	0	2.		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5	Dokumen	350,000,000			5	350,000,000
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Muara Badak, Tenggarong, Kembang Janggut	5	Dokumen	350,000,000	APBD		5	350,000,000
2	1	0			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan		86	Persen	600,000,000	APBD		90	600,000,000

2	1	0	2.		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum		4	Dokumen	400,000,000			4	400,000,000
2	1	0	2.	0	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Muara Badak, Sebulu (Giri Agung), Kota Bangun, Muara Kaman (Bunga Jadi), Muara Jawa, Marang Kayu	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	0	2.	0	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kembang Janggut (Long Beleh Haloq), Tabang (Gunung Sari, Long Lalang), Marang Kayu	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000

2	1	0	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Anggana, Muara Badak, Sebulu, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Marang Kayu	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kecamatan Kembang Janggut (Desa Long Beleh Haloq) (Desa Long Beleh Modang), Tabang (Desa Long Lalang), Marang Kayu (Desa Santan Tengah) (Desa Semangkok) (Desa Santan Ulu)	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000

2	1	0	2.		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	Dokumen	200,000,000			2	200,000,000
2	1	0	2.	0	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bangun , Kenohan , Muara Kaman	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000

2	1	0	2	0	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kembang Janggut (Desa Long Beleh Haloq) (Desa Long Beleh Modang), Muara Muntai (Desa Perian) (Desa Muara Leka), Muara Wis (Desa Lebak Mantan), Tabang (Desa Long Lalang) (Desa Gung Sari).	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	0			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat		30	Persen	200,000,000	APBD		45	250,000,000
2	1	0	2	01	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota		2	Dokumen	200,000,000			2	250,000,000

2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Anggana , Sebulu , Muara Kaman , Sanga Sanga	1	Laporan	100,000,000	APBD		1	75,000,000
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Sanga-sanga, Anggana	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	0	2	0	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	Kab. Kutai Kartanegara	0	Dokumen	-			1	75,000,000
2	1	0	0	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat		60	Persen	934,799,664	APBD		65	824,799,664

2	1	0	2.		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong		1	Dokumen	100,000,000			1	100,000,000
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Kecamatan Anggana dan Muara Badak	1	Laporan	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	0	2.		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		2	Dokumen	834,799,664			2	724,799,664
2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Kecamatan Kota Bangun, Kembang Janggut, tenggarong, Tenggarong Seberang, Loajan	1	Laporan	100,000,000	APBD		1	100,000,000

2	1	0	2	0	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Kecamatan Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Loa Janan, Tabang, Kembang Janggut	1	Dokumen	734,799,664	APBD		1	624,799,664
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat		83	Persen	200,000,000	APB D		84	200,000,000
2	1	0	2		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT		2	Dokumen	200,000,000			2	200,000,000

2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu, Muara Wis	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
---	---	---	----	---	--	---	--	---	---------	-------------	------	--	---	-------------

2	1	0	2.	0	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Kembang Janggut, Samboja	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	1			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penatagunaan Tanah		77	Persen	300,000,000	APBD		78	200,000,000
2	1	1	2.	01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		1	Dokumen	300,000,000			2	200,000,000

2	1	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bangun	1	Laporan	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	1	2	0	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Kecamatan Kota Bangun, Loa Kulu, Tenggarong Seberang	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kota Bangun	1	Dokumen	100,000,000	APBD			-
					JUMLAH						16,179,655,600			16,179,655,600

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana operasional tahunan dalam rangka untuk menjalankan tugas pokok sesuai dengan yang diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah .

Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan dokumen yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan arah, tujuan, sasaran dan target prioritas pembangunan jangka pendek tahun 2023

Semoga Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023. Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen ini.

Ditetapkan di : Tenggarong

Tanggal. : Juli 2022

Kepala Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang



SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671027 199403 1 008